

**ABSTRAK**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT**  
**NOMOR 973/154 TAHUN 2018**

**Oleh :**  
**Eva Sunasti**

**Dosen Pembimbing:**

**Acim Supriadi, S.E., M.M**

**Thomas Nadeak, S.E., M.M**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang dengan adanya surat keputusan gubernur nomor 973/147 tentang pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan berupa denda pajak kendaraan bermotor (PKB) jenis penelitian yang diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Data yang didapatkan oleh peneliti adalah data yang diambil langsung dari kantor Samsat Kabupaten Karawang. data yang diterima adalah data sekunder, berupa data perolehan tahunan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama selama 5 tahun yakni tahun 2014 sampai dengan 2018, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan dalam mengolah data yang telah didapat diolah menggunakan teknik pengukuran efektivitas dengan rumus Change Price Index (CPI).

dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan adanya surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 973/154 yakni, pada tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai targetnya sebesar 105,99% dengan ini dapat

dinyatakan bahwa efektivitas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dinyatakan mencapai targetnya atau tingkat efektivitasnya sangat baik, sedangkan pada bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2018 mengalami penerimaan sebesar 112,90% dari target yg ditentukan, dengan ini berarti efektivitas pada tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditentukan dengan adanya surat keputusan gubernur jawa barat dengan diadakannya program pembebasan pokok dan sanksi administratif.



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF RECEIVING MOTOR VEHICLE TAX AND BEHAVIOR OF MOTOR VEHICLE NAME OF 973/154 REGIONAL AUTOMATIC REVENUE**

**By:**

**Eva Sunasti**

**Supervisor:**

**AcimSupriadi, S.E., M.M**

**Thomas Nadeak, S.E., M.M**

*This study aims to find out how much motor vehicle tax receipts and motor vehicle name transfer fees in Samsat Karawang regency with a governor's decree number 973/147 regarding the granting of principal exemptions and administrative sanctions in the form of fine fees for transfer of the name of a motor vehicle (BBNKB) on the transfer of ownership second and in the form of a motor vehicle tax penalty (PKB) type of research that was examined using qualitative research methods.*

*Data obtained by researchers is data taken directly from the Samsat office in Karawang Regency. The data received is secondary data, in the form of annual acquisition data from motor vehicle tax receipts and transfer fees for 5 years, from*

*2014 to 2018, while the data collection techniques used in this study are interviews, documentation, and in processing data that has been obtained processed using effectiveness measurement techniques with the Change Price Index (CPI) formula and analysis using t test.*

*From this research, it can be concluded that the receipt of motor vehicle tax and motor vehicle transfer fees with the Governor of West Java Decree number 973/154 namely, in 2018 motor vehicle tax revenue reaches its target of 105.99% with this it can be stated that the effectiveness of motor vehicle tax revenue can be stated to reach its target or the level of effectiveness is very good, while in the transfer of motor vehicle transfer fees in 2018 experienced revenues of 112.90% of the target set, this means that effectiveness in 2018 has reached the target set by the existence of a decree of the governor of West Java with the holding of the main exemption program and administrative sanctions.*

